

**PENGELOLAAN DIKLATPIM TINGKAT IV
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU**

Lusiana (Dinas Diknas Kota Lubuklinggau)

e-mail: lusianamatdjuri@gmail.com

Manap Somantri (Prodi MAP FKIP Unib)

Osa Juarsa (Prodi MAP FKIP Unib)

Abstract

The objective of this study is to describe the management of forth level leadership training at Education and Training Center of Lubuklinggau City. The method used in this study is descriptive qualitatif. The technique of collecting the data through interview, observations and documentation. The result of the research show that the the management of forth level leadership training at Education and Training Center of Lubuklinggau City implemented with the goal of building the civil servants' operational leadership competencies who will or who have occupied echelon IV. The capability is the ability to plan the agency's activities and lead the implementation of these activities. that the the management of forth level leadership training at Education and Training Center of Lubuklinggau City has managed by structural training sector and the division head of leadership training as a tecnical implementation of the activities.

Keywords: A management of leadership training, for levels training porvider

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, and dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kompetensi kepemimpinan operasional aparatur pegawai negeri sipil yang akan dan telah menduduki jabatan esselon IV. Kemampuan tersebut yaitu kemampuan menyusun perencanaan kegiatan instansi dan memimpin implementasi kegiatan yang telah disusunnya. Pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh bidang diklat struktural, pelaksana teknis kegiatan dijabat oleh kepala sub bidang kepemimpinan.

Kata Kunci: Pengelolaan Diklatpim, Tk IV, Badan Diklat

PENDAHULUAN

Faktor sumber daya manusia sangat dominan pengaruhnya. SDM yang berkualitas bisa dilihat prestasi kerjanya, dalam rangka produktivitas yang baik adalah bagaimana seorang pegawai mampu memperlihatkan perilaku kerja yang mengarah pada tercapainya maksud dan tujuan suatu organisasi/instansi. Dengan demikian pelatihan dan pemahaman tugas terhadap pegawai memiliki peranan penting bagi organisasi untuk menciptakan produktivitas yang maksimal (Kertanegara, 2009:11).

Pegawai merupakan aset penting yang wajib mereka jaga. Oleh karena itu organisasi/instansi yang bergerak dibidang jasa pelayanan yang mengandalkan tingkat produktivitas pegawai di instansi, maka para pegawai dituntut untuk mampu mengoptimalkan produktivitasnya. Salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan produktivitas pegawai tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan yang handal dan memberikan motivasi kepada pegawai agar memiliki prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Seiring dengan dituntutnya pegawai untuk meningkatkan aktivitasnya, maka

seorang pegawai diminta mampu menyelesaikan pekerjaannya karena terkadang ada faktor yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut (Fahmi, 2008 : 7).

Untuk mencapai suatu konsepsi prestasi kerja dalam organisasi instansi pemerintah terlebih dahulu perlu merumuskan tujuan dan sasaran manajemen dalam system dan organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan sasaran manajemen dalam suatu organisasi birokrasi swasta berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam mengoperasionalkan dan mencapai prestasi kerja. Oleh karena itu manajemen harus dapat mengidentifikasi dan memahami secara lebih baik terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan menghasilkan prestasi yang baik. Prestasi yang baik merupakan ditunjang oleh pelatihan yang diberikan kepada pegawai juga kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Seperti diketahui bahwasanya prestasi kerja dipengaruhi oleh pelatihan yang diikuti oleh pegawai.

Menurut Kaswan (2011:2) bahwa pelatihan adalah proses meningkatkan dan keterampilan pegawai. Pelatihan sangat didukung oleh para pemimpin perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sekaligus meningkatkan profit perusahaan. Dengan demikian pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi para pegawai kurang cakap dalam keterampilan kerja, dan sekaligus mengurangi dampak negatif yang disebabkan kurangnya pendidikan dan pengalaman yang terbatas.

Pemerintah mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, yang dilakukan bersama dengan unsur-unsur (*stakeholders*) lainnya yakni dunia usaha (*private sectors*) dan masyarakat (*civil society*). Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatannya masing-masing yang terindikasi dari pengetahuan, wawasannya yang luas dan selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang tugasnya, serta dari nilai, sikap, dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, netral, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, dan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi seluruh jajaran PNS, terutama terhadap PNS dalam jabatan struktural karena berperan sebagai pengelola dan pelaksana kebijakan publik dan atau keputusan politik. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001, 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, maka dalam penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV harus dipersiapkan atau direncanakan secara sungguh-sungguh agar pelaksanaan dapat dijalankan secara profesional, efektif dan efisien, dengan menggunakan tata kelola yang akuntabel. Menyadari hal tersebut, penulis berusaha menuangkannya dalam “Pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau”.

Pada dasarnya pengelolaan secara teori merupakan salah satu pengalihan biasa dari istilah manajemen yaitu merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan melibatkan orang lain serta menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

Sulistyo (1982:18) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah seluk beluk liku usaha yang dijalankan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan potensi yang ada, yang dilakukan oleh personil yang dikerjakan dibawah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi serta evaluasi dari pengurus yang bersangkutan.

Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/ pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Kaufman (1972); Hadikumoro (1980) (dalam Manap, 2013:1) mengemukakan perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Manap (2013:1) mengatakan sebagai suatu proyeksi perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Hasibuan (2007:19) mengemukakan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

Pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi dari rencana yang telah dibuat yang merupakan salah satu faktor utama dan sangat mempengaruhi terhadap efektifnya program pelatihan. Oleh karena itu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan, aturan dan persyaratan pelaksanaan latihan sehingga hasil pelaksanaan latihan efektif, berdaya guna, bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Pelaksanaan pelatihan merupakan perwujudan tindakan nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pelatihan proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling utama agar peserta pelatihan mempunyai kemauan atau keinginan untuk ikut serta terlibat dalam proses pembelajaran maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan informasi tentang kejelasan dari program pelatihan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi peserta untuk melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pelatihan merupakan interaksi edukatif antara instruktur dan peserta dan antara sesama peserta dalam mencapai tujuan belajar mempunyai implikasi dan tergantung kepada pemilihan dan penetapan

diantaranya materi pelatihan, metode dan prinsip-prinsip belajar serta dan bagaimana penerapannya.

Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (outcomes) (Hogwood and Gunn, 1989). Monitoring berkaitan erat dengan evaluasi, karena evaluasi memerlukan hasil dari monitoring yang digunakan dalam melihat kontribusi program yang berjalan untuk dievaluasi. (<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-dan-tujuan-monitoring.html>) diakses 28 Juli 2016.

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.

Tyler (dalam Tayibnaps, 2003:3) evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi Diklat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan Nomor: KEP-358/PP/2003nn tanggal 7 Mei 2003 adalah evaluasi hasil belajar peserta, evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan diklat.

Menurut Wirjana & Suprpto (2005:121) kegiatan pelatihan dievaluasi sebelum, selama dan sesudah pelatihan, dengan kriteria sebagai berikut: 1) sebelum pelatihan harus dilakukan asesmen kebutuhan (training needs assessment), 2) Selama pelatihan harus digunakan teknik-teknik yang dapat mendeteksi apakah mereka mengerti yang diajarkan, respons partisipan, kegunaan materi pelatihan bagi partisipan dan sebagainya, 3) Sesudah pelatihan diselesaikan kemudian dilakukan perbandingan atas hasil tes pra-latihan dengan hasil tes sesudah pelatihan.

Menurut tjiptono & Diana (2001:233) "evaluasi pelatihan dimulai dari pernyataan tujuan yang jelas. Tujuan yang luas tidak akan membingungkan bila dibuatkan sasaran pelatihan yang spesifik. Tujuan pelatihan merupakan konsep yang luas. Sasaran tersebut menterjemahkan tujuan tersebut menjadi lebih spesifik dan dapat diukur.

Evaluasi Diklat merupakan suatu proses peningkatan mutu dan merupakan suatu penghubung antara tahap pelaksanaan Diklat, tahap perencanaan diklat dan tahap analisis diklat. Sistem evaluasi diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat), utamanya dengan menggunakan penilaian atas peserta

diklat untuk membantu menentukan apakah diklat dapat ditingkatkan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau nomor 01 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan khususnya untuk aparatur pemerintah dilaksanakan oleh Bidang pendidikan dan pelatihan yang merupakan salah satu bidang dari struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau.

Seiring dengan perkembangan kota Lubuklinggau yang semakin maju, tuntutan akan Sumber Daya Manusia yang profesional terutama dikalangan Pegawai negeri Sipil sangat mendesak, dan tentunya hal ini menyebabkan tugas dari Bidang Diklat BKD Kota Lubuklinggau semakin berat, karena harus melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan intensitas yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, timbulah pemikiran bahwa di Kota Lubuklinggau sangat perlu dibentuk suatu Badan (Lembaga teknis daerah) yang khusus menangani kegiatan pendidikan dan pelatihan. Maka guna melengkapi pembentukan suatu Badan (lembaga teknis daerah) tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tepatnya pada Tanggal 26 Desember 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pendidikan dan pelatihan (Bandiklat) yang sebelumnya merupakan Bidang Diklat Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau serta berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota

Lubuklinggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori pengembangan dan pengelolaan Diklatpim tingkat IV.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam penelitian ini penulis mempelajari masalah yang terjadi mengenai pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data induktif dan analisis reflektif yaitu analisis yang berpedoman pada cara berpikir yang merupakan kombinasi yang jitu antara berfikir induksi dan deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diklatpim tingkat IV ditujukan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan eselon IV. Diklat pada instansi pemerintah, telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Aparatur Pegawai Negeri Sipil, dimana penyelenggaraan diklat jabatan ini merupakan pemenuhan persyaratan pengembangan karier bagi setiap aparatur untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon IV seperti tersebut di atas, penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang bertujuan sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional dirasakan tidak cukup. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta

tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan Diklatpim tingkat IV. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim tingkat IV ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.

Pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau Diklatpim Tingkat IV merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Diklat Struktural dengan pelaksana teknis dijabat oleh Kepala Sub Bidang Kepemimpinan. Pengelolaan Diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dilaksanakan dengan tujuan membangun kompetensi kepemimpinan operasional aparatur pegawai negeri sipil yang akan dan telah menduduki jabatan eselon IV yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan Pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun pada perencanaan pengelolaan kegiatan Diklatpim Tingkat IV berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut tentang penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, adapun peraturan tersebut meliputi:

- UU Nomor 01 tahun 2004 : tentang perbendaharaan negara;
- PP Nomor 58 tahun 2005 : tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006: tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Permendagri Nomor 21 tahun 2011: tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 13 tahun 2015: tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 tahun 2015 : Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut perencanaan Diklatpim Tingkat IV diatur sebagai berikut:

1. Badan Diklat Kota Lubuklinggau menganggarkan kegiatan diklat di Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satker yang diajukan di tahun sebelumnya;
2. Jika RKA dan DPA (pagu definitif) sudah final, maka Badan Diklat menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk Rincian Anggaran & Biaya (RAB) dan rencana kebutuhan penyelenggaraan diklat tahun berjalan;
3. Perencanaan pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dilakukan apabila calon peserta Diklat yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian telah menduduki jabatan struktural eselon IV. Apabila belum menduduki jabatan struktural eselon IV, maka peserta tersebut telah masuk dalam perencanaan pola karir yang diindikasikan dengan adanya rekomendasi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV dan peserta tersebut wajib mengikuti seleksi untuk mengikuti Diklatpim terlebih dahulu;
4. Badan Diklat Kota Lubuklinggau merencanakan kebutuhan penyelenggaraan, mempersiapkan sarana dan prasarana Diklatpim Tingkat IV yang diperlukan, meliputi: jadwal pembelajaran, widyaiswara, pengelola dan penyelenggara, serta fasilitas diklat;
5. Badan Diklat Kota Lubuklinggau membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Tenaga Pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian dan pembimbingan terhadap peserta Diklat;
6. Apabila jumlah calon peserta Diklatpim Tingkat IV kurang dari 50% dari jumlah maksimal yang dipersyaratkan, maka calon peserta tersebut dapat direkrut dari Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi lainnya dengan koordinasi Instansi Pembina;
7. Apabila perencanaan Diklatpim Tingkat IV dimaksud telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam panduan, maka Kepala Badan Diklat menetapkan penyelenggaraan Diklatpim dimaksud dalam keputusan, dan menyampaikan keputusan tersebut bersama perencanaan Diklat kepada instansi pembina yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya satu bulan sebelum Diklat dilaksanakan.
8. Biaya Progam Diklatpim Tingkat IV dibebankan pada Mata Anggaran Kegiatan Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

Pengorganisasian penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV berkaitan erat dengan penataan atau pengaturan organisasi guna terciptanya komunikasi yang efektif sehingga tercapainya tujuan dari penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV. Tujuan pengorganisasian dalam penyelenggaraan diklatpim Tingkat IV adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota tim penyelenggara dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu.

Adapun wujud dari pengorganisasian dari pengelolaan Diklatpim Tingkat IV ini adalah terbentuknya sebuah struktur baik itu struktur organisasi Badan Diklat Kota Lubuklinggau maupun struktur Tim panitia penyelenggara Diklat. Tugas panitia/ penyelenggara adalah menyelenggarakan diklat meliputi pemantauan umum harian, pemantauan kegiatan di luar kelas dan penilaian perubahan.

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau sebagai lembaga diklat pemerintah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV. Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan selama 97 Hari Kerja, 282 JP atau 32 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, dan 585 JP atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani/mental sebanyak 24 JP.

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dikoordinasikan oleh Kedeputian yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, yang melakukan hal-hal berikut :

1. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program Diklatpim Tingkat IV meliputi antara lain jumlah peserta, widyaiswara, sarana dan prasarana, jadwal dan kegiatan pelaksanaan serta pembiayaan;
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program serta evaluasi pasca Diklat;

3. Menyampaikan laporan keseluruhan kegiatan pelaksanaan program kepada Kepala Lembaga administrasi Negara.

4. Memantau persiapan pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV yang senantiasa mengalami kendala, dalam ini biasanya jumlah peserta yang belum memenuhi persyaratan sehingga terkadang harus menunggu jumlah yang diinginkan untuk melaksanakan diklatpim IV ini. Kendala seperti inilah terkadang yang harus diperhatikan dengan mempertimbangkan masa kerja, golongan maupun jabatan pegawai dalam melaksanakan dan mengikuti diklatpim IV yang diadakan oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan diadakannya Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau diantisipasi dengan mempersiapkan cadangan yang menjadi solusi agar Diklatpim Tingkat IV tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Pengunduran atau percepatan waktu dalam pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau terkadang terjadi dikarenakan faktor yang tidak dapat dihindarkan.

Tujuan monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan Diklatpim IV dilaksanakan. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh penyelenggara Diklat yang telah ditunjuk sebagai anggota kepanitiaan. Monitoring diselenggarakan guna tercapainya tujuan sasaran diklat.

Kendala dalam pelaksanaan monitoring, monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau yang dilakukan terkadang masih ada peraturan yang tidak dipatuhi oleh peserta diklatpim tingkat IV. Kendala dalam pelaksanaan monitoring adalah monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau yaitu saat kegiatan Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan.

Pelaksanaan evaluasi terhadap monitoring dilakukan pada pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dilakukan pada saat tahap akhir kegiatan

Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan. Kegiatan evaluasi terhadap Diklatpim Tingkat IV dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, widyaiswara, penyelenggaraan dan pasca-diklat. Evaluasi peserta meliputi Sikap perilaku yang terdiri dari integritas, etika, kedisiplinan, kerjasama, dan prakarsa. kualitas perubahan, yang terdiri dari identifikasi perubahan, rancangan perubahan dan pemimpin perubahan.

Evaluasi widyaiswara dilakukan oleh peserta dan tim evaluator widyaiswara. Aspek yang dinilai peserta meliputi sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, ketepatan waktu dan kehadiran, penggunaan metode dan sarana diklat, sikap perilaku, cara menjawab pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pemberian motivasi kepada peserta, kerapian berpakaian, serta kerjasama anatar widyaiswara dalam tim. Adapun aspek yang dinilai tim evaluator widyaiswara adalah implementasi dari sertifikat kompetensi yang dimiliki, meliputi pengelolaan pembelajaran, dengan sub kompetensi kemampuan dalam membuat satuan acara pembelajaran (SAP)/Rencana pembelajaran (RP), menyusun bahan ajar, menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi efektif dengan peserta dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif dengan sub kompetensi menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi yang diajarkan, dan menulis karya tulis. Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator widyaiswara kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dan widyaiswara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran dimasa mendatang.

Evaluasi penyelenggaraan adalah evaluasi untuk pengelola dan penyelenggara diklat. Aspek yang menjadi penilaian adalah perencanaan program diklat, pengorganisasian, dan pelaksanaan sedangkan untuk penyelenggara diklat meliputi, pelayanan kepada peserta, pelayanan kepada widyaiswara, dan pengadministrasian diklat. Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara diklat dilakukan oleh tim evaluator pengelola dan penyelenggara, termasuk oleh peserta sebagai pembanding. Hasil penilaian disampaikan Tim evaluator pengelola dan penyelenggara kepada Kepala Lembaga Diklat dan penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.

Evaluasi pasca diklat adalah evaluasi yang dilakukan setelah penyelenggaraan diklat berakhir, mekanisme dan prosedur evaluasi pasca diklat dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan diklat berakhir, evaluasi ini dilakukan guna mengetahui dan mengukur tingkat pemanfaatan alumni diklat dalam jabatan struktural dan perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan. Evaluasi pasca diklat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan unit kepegawaian instansi dan hasilnya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian alumni, pimpinan instansi alumni, Instansi Pembina Diklat dan Instansi Pengendali Diklat. Instansi pembina diklat menggunakan hasil evaluasi pasca diklat sebagai masukan untuk penyempurnaan program diklat selanjutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan umum penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan diklatpim tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau dikelola oleh Bidang Diklat Struktural dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan dijabat oleh Kepala Sub Bidang Kepemimpinan, dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina diklat.

Secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Perencanaan Pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun 2013, meliputi perencanaan kurikulum/silabus, materi, metode pengajaran dan jumlah peserta, dan peraturan perundang-undangan berlaku menyangkut tentang penatausahaan keuangan SKPD.

Kedua adalah Pengorganisasian Pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau merupakan proses penyusunan struktur kepanitiaan penyelenggara yang disusun oleh Kepala Bidang Diklat Struktural bersama Kepala Sub Bidang diklat Kepemimpinan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, guna terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar individu panitia penyelenggara. *Ketiga* adalah Pelaksanaan pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan

Diklat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau sebagai lembaga diklat pemerintah yang telah diakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelaksanaan pengelolaan diklatpim tingkat IV merupakan implementasi dari struktur kurikulum diklat yang terdiri dari lima tahap yaitu tahap pembelajaran dan mata diklat, tahap membangun komitmen bersama, tahap merancang perubahan, tahap laboratorium kepemimpinan (leadership laboratory) dan tahap evaluasi.

Keempat adalah Monitoring dan evaluasi pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau terdiri dari dua kegiatan yaitu 1) monitoring meliputi monitoring umum harian dan monitoring kegiatan diluar kelas. 2) evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap peserta, kinerja penyelenggara, widyaiswara dan evaluasi pasca diklat. Evaluasi pasca diklat dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh inspektorat sebagai instansi pembina kepegawaian.

Saran

Sebagai penutup akhirnya peneliti memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pengelolaan Diklatpim Tingkat IV pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Pertama, meskipun penyelenggara telah dapat memproyeksikan kebutuhan berdasarkan pedoman penyelenggaraan diklat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun penyelenggara juga hendaknya melaksanakan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada setiap Diklatpim tingkat IV sebelumnya untuk dijadikan pedoman perencanaan pengelolaan Diklatpim tingkat IV selanjutnya.

Kedua, selain kegiatan pengorganisasian yang telah dilakukan secara terkoordinir, Kabid Diklat Struktural dan Kasubbid Diklat Kepemimpinan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan hendaknya juga mengadakan/melakukan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual agar pengorganisasian dalam pengelolaan diklatpim tingkat IV tetap terjaga dan solid.

Ketiga, agar kiranya pelaksanaan pengelolaan diklatpim tingkat IV dapat terus dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Keempat, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan diklatpim tingkat IV hendaknya dapat terus dilaksanakan agar dapat membantu peningkatan pelaksanaan diklat dimasa yang akan datang dan sebagai penyempurna pelaksanaan diklat hendaknya evaluasi pasca diklat tidak hanya dilakukan oleh inspektorat sebagai Instansi pembina kepegawaian tetapi juga dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan penyelenggara diklat bekerjasama dengan unit kepegawaian instansi dan hasilnya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian alumni, pimpinan instansi alumni, Instansi Pembina Diklat dan Instansi Pengendali Diklat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bernadine R. wirjana, M.S.W dan Susilo, Supardo. 2005. *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Andi Offset
- Fahmi, I., 2008. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Alfabeta
- Hadari, N., at.al. 2006. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: UGM Press
- <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pengorganisasian-menurut.html>
- Kaswan, 2011. *Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta: Alfabeta
- Kertanegara. 2009. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Somantri, Manap. 2014. *Perencanaan Pendidikan*. Bogor: IPB Press
- Sulistyo, 1982. *Pengantar Ekonometri*, Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada
- Tayibnapi, F.Y., 2003. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjiptono, F., dan A. Diana. 2001. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Valentine
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rineka Cipta

